

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan global yang memiliki dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan data dari World Bank (2001) lebih dari 690 juta orang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem dengan pendapatan di bawah 2,15 dolar atau Rp35.000 per hari. Kemiskinan bukan hanya sekadar keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan primer, melainkan juga berdampak bagi psikologis individu yang mengalaminya. Pada studi yang dilakukan terhadap masyarakat miskin di 60 negara menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan pengalaman hidup yang buruk. Kemiskinan berarti hidup seperti di dalam penjara, terperangkap dalam rumah dan tidak mampu keluar dikarenakan keterbatasan biaya World Bank (2001).

Temuan terkini mengindikasikan bahwa dimensi psikologis memiliki peran penting dalam menjelaskan keberlangsungan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, Haushofer & Fehr (2014) menyampaikan bahwa kemiskinan memiliki konsekuensi psikologis yang dapat mendorong individu melakukan perilaku ekonomi tidak efektif sehingga akan sulit bagi masyarakat miskin untuk keluar dari *poverty trap*. Tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh kemiskinan justru menciptakan jebakan bagi individu terhadap keberlanjutan kemiskinan tersebut. Tidak hanya itu, Haushofer & Fehr (2014) menyebutkan bahwa dibutuhkan pendekatan psikologis dalam pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, kajian mengenai kemiskinan masih didominasi oleh pendekatan ekonomi struktural, sedangkan belum banyak yang membahas dari aspek psikologis. Untuk itu, penelitian ini hadir guna menjawab celah tersebut dengan menawarkan pendekatan psikologi sebagai perspektif untuk memahami dinamika kemiskinan.

Masyarakat miskin cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental dibanding masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi, terutama gejala depresi (Mungai & Bayat, 2019). Sejalan dengan pernyataan di atas, Lund et al. (2010) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang kuat dengan *Common Mental Disorders* (CMD) seperti depresi, kecemasan, dan gangguan somatoform di negara-negara yang memiliki penghasilan rendah. Dalam 115 studi menunjukkan sebagian besar masyarakat miskin berasosiasi positif terhadap gangguan mental. Artinya, semakin tinggi kondisi kemiskinan, maka semakin tinggi pula kecenderungan individu tersebut mengalami gangguan kesehatan mental.

Dalam memahami keterkaitan antara kondisi ekonomi dengan kesejahteraan psikologis, studi yang dilakukan oleh Sacks et al. (2010) memberikan pandangan bahwa individu dengan pendapatan yang rendah memiliki *subjective well being* yang lebih rendah jika dibandingkan dengan individu dengan pendapatan lebih besar di negara yang sama. Temuan tersebut mendukung bahwa kemiskinan berasosiasi dengan rendahnya tingkat kebahagiaan, meningkatnya risiko depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, semakin rendah kondisi ekonomi seseorang, semakin tinggi pula kerentanannya terhadap tekanan psikologis dan dampak negatif lainnya. Sebaliknya, penurunan kemiskinan cenderung diikuti oleh perbaikan dalam kesehatan mental dan emosional individu.

Tidak hanya di lingkup global, kemiskinan juga merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh survei sosial ekonomi, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 25,22 juta orang atau sebesar 9,03 persen. Adapun angka ini terbagi menjadi dua daerah, yaitu perkotaan dan perdesaan. Angka kemiskinan di perkotaan sebesar 11,64 juta atau 7,09 persen, sedangkan kemiskinan di perdesaan 13,8 juta orang atau 11,79 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Adapun menurut UU No. 24/1992 wilayah perkotaan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Meskipun jumlah penduduk miskin di desa lebih tinggi, kemiskinan di perkotaan lebih kompleks dan multidimensional. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Mathur (2013) bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat kemiskinan di perkotaan lebih kompleks. Pertama, masyarakat miskin perkotaan rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti resesi 2008 yang mendorong lebih dari 100 juta orang ke bawah garis kemiskinan. Kedua, terdapat ketimpangan pendapatan ekstrem yang dapat memicu ketegangan sosial, protes, dan kerusuhan. Ketiga, terdapat 40-60% tenaga kerja informal di perkotaan, menyebabkan risiko ekonomi bagi masyarakat miskin. Adapun faktor terakhir ialah kota semakin rentan terhadap bencana, perubahan iklim, dan polusi, yang dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin perkotaan.

Kemiskinan perkotaan di Indonesia menjadi isu yang mendesak dikarenakan pesatnya laju urbanisasi. Sebagai pusat perekonomian nasional, Jakarta memiliki daya tarik dalam menawarkan peluang kerja. Namun, banyak dari kekosongan peluang kerja justru diisi oleh pekerja di sektor informal. Data Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan bahwa pada Agustus 2022, dari 4,88 juta pekerja di Jakarta, sekitar 38,6% merupakan pekerja informal. Hal ini menggambarkan tingginya angka pekerja informal di Jakarta. Menurut Madya (2024) pekerja informal rentan dengan pendapatan yang rendah dan tidak tetap, tidak memiliki kontrak kerja, tidak mendapatkan upah saat cuti, serta tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai, atau bahkan sama sekali tidak memilikinya.

Kesenjangan antara kelompok miskin dan non-miskin kian melebar, dengan koefisien gini meningkat dari 0,31 menjadi 0,35. Kondisi ini diperparah dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh sebesar 12,12%, serta keterbatasan terhadap layanan dasar, di mana hanya 42,5% masyarakat perkotaan memiliki akses ke air bersih dan 72,8% terhadap sanitasi (Mathur, 2013). Ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah gaya hidup kota yang mewah menyebabkan kemiskinan di perkotaan jauh lebih menimbulkan stres jika dibandingkan pada kemiskinan di pedesaan.

Kemiskinan tidak hanya berdampak pada keterbatasan materi, tetapi juga memengaruhi cara individu berpikir dan mengambil keputusan. Individu yang

hidup dalam kondisi kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan yang penuh dengan tekanan, cenderung memiliki pandangan masa depan yang lemah, sehingga biasanya individu tersebut lebih bergantung pada keberuntungan dalam menghadapi risiko di masa depan (Fisher, 1930). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan sangat berkaitan erat dengan kualitas pengambilan keputusan individu, terutama dalam situasi yang membutuhkan pertimbangan jangka panjang. Hal ini didukung oleh pernyataan Spears (2010) yang mengatakan bahwa kemiskinan dapat membatasi kapasitas perhatian dan sumber daya kognitif, sehingga masyarakat miskin akan sulit dalam berpikir strategis dan jangka panjang.

Tekanan finansial secara terus-menerus yang dihadapi masyarakat miskin menyebabkan beban kognitif dalam bentuk stres dan afek negatif. Stres yang dialami masyarakat miskin memiliki dampak signifikan dalam pengambilan keputusan. Keputusan irasional yang dilakukan oleh individu miskin disebabkan oleh adanya kecenderungan dalam memprioritaskan kepentingan jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Hal ini dijelaskan oleh Shah et al. (2012) bahwa individu yang tengah berada dalam kekurangan akan berfokus pada *salient cues* atau aspek yang mendesak. Akibatnya, dalam pengambilan keputusan, individu cenderung mengabaikan konsekuensi jangka panjang demi memenuhi kebutuhan yang paling mendesak.

Masyarakat miskin memiliki kecenderungan untuk berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak. Untuk memenuhi kebutuhan harian yang tidak dapat ditunda, masyarakat miskin cenderung membuat keputusan instan, misalnya dengan berutang. Umumnya, masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap pasar kredit formal. Akibatnya, mereka harus meminjam uang dari sumber informal, seperti teman, kerabat, atau rentenir. Selain jumlah pinjaman yang diberikan terbatas, pasar kredit informal memberikan bunga yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan pasar kredit formal. Dalam jangka panjang, hal ini justru dapat memperburuk kondisi keuangan dikarenakan pengeluaran untuk membayar utang serta bunga dari pinjaman tersebut mengurangi kemampuan untuk menyimpan atau berinvestasi guna menyelamatkan dari jerat kemiskinan.

Masyarakat miskin yang terjat dalam keterbatasan likuiditas menimbulkan adanya preferensi untuk mendapatkan imbalan kecil dalam waktu masa kini dibanding imbalan besar dalam waktu masa depan. (Banerjee & Duflo, 2012; dalam Haushofer & Fehr (2014). Fenomena di atas dapat dijelaskan lebih lanjut dengan konsep diskonto waktu. Menurut Mishra & Lalumière (2017) diskonto waktu merupakan sebuah preferensi di mana seseorang lebih memilih imbalan dengan nilai yang kecil namun didapatkan lebih cepat dibanding imbalan yang lebih besar namun didapatkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa rumah tangga miskin memiliki tingkat diskonto waktu yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga kaya. Hasil yang serupa juga didapatkan pada sampel yang berbeda, yaitu Ethiopia dan India Selatan (Haushofer & Fehr, 2014).

Fenomena diskonto waktu memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Salah satu contoh nyata dari urgensi diskonto waktu dapat dilihat dalam praktik masyarakat miskin yang memilih untuk mengambil pinjaman online (pinjol) berbunga tinggi demi memenuhi kebutuhan harian. Meskipun pinjaman ini berisiko menimbulkan beban keuangan di masa depan, kebutuhan akan uang tunai dalam waktu cepat menjadikan opsi ini sebagai pilihan yang rasional dalam konteks keterbatasan (Shah, Mullainathan, & Shafir, 2012). Dalam hal ini, tekanan untuk bertahan hidup hari ini lebih besar daripada manfaat menunggu atau merencanakan jangka panjang, sehingga keputusan yang bersifat pendek pandang menjadi lebih mungkin terjadi (Haushofer & Fehr, 2014).

Contoh lain terlihat pada keputusan orang tua dari keluarga miskin di kawasan padat penduduk perkotaan seperti Tambora, Jakarta Barat, yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan anak hingga jenjang tinggi. Mereka lebih memilih anak bekerja sebagai buruh atau pengemudi ojek daring agar dapat membantu ekonomi keluarga. Keputusan ini, meskipun bermanfaat dalam jangka pendek, justru mengorbankan peluang mobilitas sosial anak di masa depan. Hal ini menunjukkan bagaimana tingginya diskonto waktu dapat memperkuat kemiskinan antar generasi (Sheehy-Skeffington & Rea, 2017).

Diskonto waktu juga berkaitan erat dengan pola konsumsi tidak sehat yang umum ditemukan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Makanan cepat saji yang murah dan mudah diakses menjadi pilihan utama, meskipun berdampak buruk terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa pilihan-pilihan yang diambil bukanlah semata-mata karena ketidaktahuan, melainkan hasil adaptasi terhadap realitas keterbatasan ekonomi dan sosial (Mani et al., 2013). Maka dari itu, memahami diskonto waktu tidak hanya penting dalam ranah psikologi ekonomi, tetapi juga sangat relevan dalam desain kebijakan sosial yang menyasar kelompok rentan.

Dalam hal ini, refleksi kognitif memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat diskonto waktu individu. Refleksi kognitif merupakan kecenderungan individu untuk menunda respons intuitif dan menggunakan pemikiran logis yang lebih rasional sebelum mengambil keputusan (Frederick, 2005). Studi yang dilakukan oleh Lempert & Phelps (2016) menunjukkan bahwa individu dengan refleksi kognitif tinggi cenderung memiliki tingkat diskonto waktu yang rendah, hal ini dikarenakan individu tersebut mampu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa refleksi kognitif dapat membantu individu mengambil keputusan yang rasional, terkhusus dalam situasi ekonomi yang mendesak.

Hal ini dijelaskan pada *Dual Process Theory* yang dicetuskan oleh Evans (2003) bahwa proses kognitif dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi dua, yaitu keputusan intuitif yang bersifat cepat, implisit dan berbasis heuristik dan deliberatif yang bersifat lambat, rasional dan logis. Individu yang berada di bawah tekanan stres akan mengambil keputusan intuitif, hal ini disebabkan stres dapat merusak proses pertimbangan dan mengurangi kemampuan individu dalam mengevaluasi pilihan yang dihadapinya (Simonovic, et al., 2016; dalam Adamkovič & Martončik, 2017). Pemahaman mengenai stres akibat kemiskinan memengaruhi cara kerja kognitif individu menjadi penting dalam menjelaskan bias pengambilan keputusan yang sering terjadi pada masyarakat miskin, khususnya di perkotaan.

Terdapat sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Strathman et al (1994) yaitu *consideration of future consequences* atau disingkat dengan *consideration of*

future consequences. Strahtman mendefinisikan *consideration of future consequences* sebagai sejauh mana individu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka dibandingkan dengan kepuasan yang bersifat instan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Joireman et al. (2005) menunjukkan bahwa individu dengan *consideration of future consequences* yang tinggi cenderung membuat keputusan keuangan yang lebih bertanggung jawab. Sejalan dengan penelitian tersebut, Howlett et al. (2008) mengemukakan bahwa individu dengan *consideration of future consequences* tinggi lebih mungkin membuat keputusan yang menguntungkan kesejahteraan finansial jangka panjang.

Berdasarkan temuan di atas, individu dengan tingkat *consideration of future consequences* yang tinggi memiliki kecenderungan untuk berpikir lebih strategis dan sadar akan konsekuensi jangka panjang yang didapatkan pada pengambilan keputusan saat ini. Namun, masih perlu dipahami lebih lanjut peran *consideration of future consequences* dalam memengaruhi hubungan antara refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada individu yang menghadapi keterbatasan likuiditas, seperti masyarakat miskin perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengetahui apakah terdapat peran *consideration of future consequences* dalam memoderasi pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pada penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi hingga mencapai angka 25,22 juta orang atau sebesar 9,03 persen.
2. Kemiskinan perkotaan di Indonesia menjadi isu yang mendesak dikarenakan bersifat kompleks dan multidimensional.
3. Individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung mengalami tekanan ekonomi yang tinggi sehingga lebih rentan menunjukkan tingkat diskonto waktu yang tinggi akibat rendahnya refleksi kognitif.

4. Menggali peran *consideration of future consequences* sebagai variabel moderator dalam hubungan antara refleksi kognitif dan diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada peran *consideration of future consequences* dengan pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterb di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian: “Apakah terdapat peran *consideration of future consequences* dalam memoderasi pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan?”

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peran *consideration of future consequences* dalam memoderasi pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam menambah wawasan dan kontribusi penting terhadap teori-teori yang berkaitan dengan *consideration of future consequences*, refleksi kognitif, dan diskonto waktu.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak terkait, di antaranya:

1.6.2.1.Masyarakat Miskin Perkotaan

Penelitian ini dapat membantu masyarakat miskin perkotaan dalam memahami pentingnya kemampuan berpikir reflektif dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman keterkaitan antara *consideration of future consequences*, refleksi kognitif, dan diskonto waktu sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan masyarakat miskin dapat lebih rasional.

1.6.2.2.Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang dapat membantu masyarakat miskin perkotaan untuk lebih mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi setiap proses pengambilan keputusan.

1.6.2.3.Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah dalam bidang psikologi sosial serta menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut.